



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO



N. Usman, M. Kes (Ketua DPRD) Bambang Riwoko, S.E (Wakil Ketua DPRD) Kayan, S.H (Wakil Ketua DPRD) Dr. Emir Ferdian, S.T., IMA (Wakil Ketua DPRD)

DPRD Target Tuntaskan 24 Raperda Tahun Ini



USMAN
Ketua DPRD Komisi B



ADHY SAMSETYO
Ketua Bapemperda



DENY HARYANTO
Wakil Bapemperda

KOTA-Produk hukum yang dihasilkan selama satu tahun menjadi salah satu indikator kesuksesan kinerja DPRD Sidoarjo. Tahun ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memiliki target untuk menuntaskan semua raperda yang masuk dalam program pembentukan perda (propemperda).
Ketua Bapemperda DPRD Sidoarjo Adhy Samsetyo mengatakan, ada 24 raperda yang masuk dalam propemperda tahun ini. Dalam perkembangannya, terdapat empat raperda yang telah disahkan menjadi perda. Dua di antaranya adalah Perda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak dan perda penggabungan kelurahan di wilayah terdampak lumpur.

Dua perda tersebut merupakan upaya untuk memperkuat perlindungan dan pelayanan terhadap anak serta penanganan masalah administrasi di wilayah terdampak lumpur. "Sudah disahkan dan disosialisasikan," ujarnya.
Selain itu, ada lima raperda juga telah disahkan. Namun saat ini masih dalam proses fasilitasi di biro hukum provinsi Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta perda penyertaan modal daerah Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Proses fasilitasi ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan perda-perda tersebut dalam kerangka hukum yang tepat.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sidoarjo Deny Haryanto

menyebutkan, sementara itu ada dua raperda sedang dalam tahap pembahasan oleh panitia khusus (pansus). Raperda pertama berkaitan dengan sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di daerah. Sedangkan raperda kedua adalah raperda tentang pengarusutamaan gender. "Yang ditujukan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai sektor kehidupan," imbuhnya.
Meskipun sudah ada sejumlah raperda yang telah diproses, masih ada 13 raperda lainnya yang masih belum dibahas secara detail. Beberapa di



SERIOUS: Suasana pembahasan propemperda dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

antaranya Nota Akademiknya sudah masuk, namun terdapat juga yang belum mendapatkan penjelasan yang lengkap.
Bapemperda mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan semua raperda yang telah masuk dalam program propemperda tahun ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap

raperda memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sidoarjo secara keseluruhan.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari Bapemperda, Ketua DPRD Sidoarjo Usman berharap semua proses pembahasan hingga pengesahan raperda dapat berjalan dengan

lancar dan tepat waktu. Menurut dia, setiap perda yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.
"Selain itu juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan," pungkasnya. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Genjot PAD, Komisi B DPRD Sidoarjo Dorong Implementasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemkab

by [ZonaJatim00](#) — 24 Juni 2023 in advertorial

0



0 SHARES 3 VIEWS

Share on Facebook

Share on Twitter



Zonajatim.com, Sidoarjo – Elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah sudah menjadi hal sangat penting. Hal itu perlu dilakukan guna menghindari adanya penyalahgunaan keuangan dan kontak langsung antara pemberi layanan dengan penerima jasa.

Zonajatim.com

Di sisi lain, elektronifikasi transaksi ini juga dinilai bisa memaksimalkan layanan dari segi efisiensi, hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jajaran pemerintah. Sebelumnya di Kabupaten Sidoarjo disinyalir masih banyak kebocoran penarikan retribusi dan pajak daerah. Karena itu Pemkab Sidoarjo didorong untuk segera mengimplementasikan elektronifikasi transaksi atau transaksi elektronik.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujiyanto menjelaskan, besarnya potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo belum terkelola secara maksimal.

Terlebih, dugaan banyaknya potensi kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) baik dari pajak dan retribusi daerah mendesak ditangani. Pihaknya meminta semua OPD menerapkan sistem elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi. "Sudah menjadi rahasia umum, potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah belum tergali maksimal. Sehingga, solusi konkret yang harus diterapkan yakni e-pajak dan e-retribusi," ungkap politisi dari Partai Gerindra ini, kemarin.



Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemungutan pajak dan retribusi manual, lanjut Bambang Pujiyanto, selama ini belum efektif mendongkrak capaian target. Sebab, mekanisme dan proses transaksinya belum terekam secara detail dalam sistem. Padahal, dengan elektronifikasi transaksi, baik pajak maupun retribusi daerah sangat mungkin diterapkan.

Caranya, cukup menggandeng vendor perbankan dalam penyediaan Elektronik Data Capture (EDC). "Dengan mesin EDC, penarikan pajak dan retribusi secara otomatis terekam berbasis data base. Sekaligus, memudahkan rekapitulasi transaksi menyeluruh," ujarnya.

Hal sama disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Sudjalil. Bahkan, pihaknya sangat mendukung implementasi transaksi elektronik pada pajak dan retribusi daerah. Sebab, biaya yang dibutuhkan lebih sedikit karena data by sistem sudah terintegrasi dengan perbankan. Dengan begitu, semua catatan pembayaran pajak dan retribusi bisa terdeteksi transparan.

Termasuk, reward (penghargaan) bagi perangkat desa yang menarik PBB lunas tercepat. Sedangkan, penghargaan bagi wajib pajak berupa terpeliharanya infrastruktur dan sarana kepentingan umum. "Selain penerapan e-pajak dan e-retribusi, harus ada sanksi tegas bagi oknum nakal. Yakni, pemungut pajak dan retribusi yang tidak disiplin, kurang tertib hingga menyelewengkan uang retribusi dan pajak," tandas Sudjalil dari PDIP ini.

Dikatakan, pemerintah daerah sudah memulai elektronifikasi transaksi sekitar lima tahun lalu. Sejak saat itu, transaksi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa jenis penerimaan pajak sudah dilakukan secara elektronik. "Seiring berjalannya waktu, kami melihat Pemkab tgerus melakukan pembaruan layanan pemerintah berbasis digital, dengan perluasan penerapan transaksi secara nontunai untuk seluruh jenis pajak daerah, pembayaran gaji, juga belanja barang dan jasa," tambahnya.

Zonajatim.com

Perluasan penerapan elektronifikasi transaksi dalam pemerintahannya sudah dilakukan lebih cepat seiring keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021. "Aturan ini mengharuskan pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota segera melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi," jelasnya. Dalam pelaksanaannya tentu pemda akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang harus dicarikan solusi. Misal, memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih gagap teknologi.

Pemkab Sidoarjo saat ini melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Kali ini menyentuh pelayanan retribusi yang semula pembayarannya secara manual, menjadi layanan sistem digital atau elektronifikasi transaksi pemda. Dengan sistem digitalisasi layanan tidak hanya memudahkan masyarakat, juga dapat memangkas birokrasi.

Satu sisi pendapatan dinilai meningkatkan karena adanya kemudahan masyarakat memunahi kewajiban membayar retribusi (pajak). "Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan," tegas Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Deny Haryanto menambahkan dalam era digital ini sudah tidak jamannya pemda memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual, karena hal ini menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan. "Semakin kita menghindari banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin lebih profesional dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah tidak jamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit semua harus menerapkan digitalisasi," tegasnya.

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Deny Haryanto

Deny menambahkan bahwa pembayaran elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri. "Kami dapat informasi bahwa semua transaksi pembayaran dari sisi pendapatan utamanya, misalnya dinas yang memungut retribusi memang ada beberapa yang belum menerapkan digitalisasi, kalau pajak sudah 100% menerapkan digitalisasi," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Deny pihaknya mengapresiasi peningkatan pemahaman kepala OPD terkait manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan. "Dari dewan sendiri kami mendorong digitalisasi transaksi di pemda," papar Deny Haryanto dari PKS ini.

Deny menambahkan, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah menjadi sangat penting, mengingat dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) dan mewujudkan e-Government yang berkualitas dengan menerapkan satu pintu lewat digitalisasi. "Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerapan transaksi non-tunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1%," ungkapnya.

Zonajatim.com

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkab Sidoarjo melakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak ataupun retribusi. Pendapatan asli daerah berpotensi melonjak berkali-kali lipat karena potensi kebocoran anggaran dapat ditekan. "Seluruh transaksi pemerintah dilakukan melalui transfer bank sehingga terekam dari level pusat hingga desa dan kelurahan. Transaksi nontunai akan mengurangi potensi kebocoran," tambah anggota Komisi B Sullamul Hadi Nurmawan.

Elektronifikasi transaksi akan memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola anggaran pemerintah daerah. Selain memastikan penyaluran dana tepat sasaran, data keuangan dari elektronifikasi transaksi juga bisa dimanfaatkan untuk menangkap potensi pendapatan asli daerah.

Kebocoran anggaran bisa ditekan karena seluruh aliran uang terekam sistem. "Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk mendorong pertukaran data keuangan. Daerah mampu mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah," ujarnya.

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sullamul menambahkan, kebocoran anggaran banyak terjadi di pos-pos pelayanan publik. Dengan elektronifikasi transaksi, potensi kebocoran dan penyelewengan anggaran bisa diminimalkan.

Penyaluran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah juga bisa lebih efektif dan efisien.

"Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bagian dari gerakan antikorupsi," ucap Gus Wawan sapaan akrab Sullamul Hadi Nurmawan politisi PKB ini.

Implementasi elektronifikasi transaksi, lanjutnya, diharapkan mampu mengurangi kasus tindak korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Celah untuk melakukan korupsi semakin kecil karena seluruh transaksi berbasis nontunai. Kasus-kasus penyelewengan anggaran transfer ke daerah diharapkan tidak terjadi lagi. Sp/adv

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DARYANTO/DUTA

Pengurus IPNU dan IPPNU Sidoarjo masa bhakti 2023-2025 saat dilantik, Sabtu malam (24/6), di Pendapa Delta Wibawa.

Bupati : Harus Punya Semangat Baru

SIDOARJO - Pengurus Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Sidoarjo periode 2023 - 2025 secara resmi dilantik di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Sabtu (24/6). Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang menghadiri pelantikan mengharap pemuda dan pemudi Sidoarjo yang dilantik jadi pengurus IPNU dan IPPNU harus mempunyai semangat baru, terobosan baru dan komitmen baru.

Bupati yang disapa Gus Muhdlor itu mengapresiasi kegiatan anak-anak muda Sidoarjo tersebut. Adanya tampilan orchestra yang menandakan bahwa pemuda-pemuda Sidoarjo bukan hanya sekedar berpendidikan tetapi juga berkeahlian.

“Selamat atas dilantiknya PC.IPNU dan IPPNU Kabupaten Sidoarjo yang baru jabatan yang diemban harusnya diiringi dengan semangat baru, terobosan yang baru dan semuanya termasuk komitmen yang baru,” ujarnya.

Ia menegaskan, yang harus digaris bawahi bahwa Sidoarjo hari ini terlampau banyak generasi muda yang berpendidikan tetapi minim yang mempunyai keahlian. Statusnya jelas sarjana tetapi pendidikan itu tidak dibarengi dengan keahlian yang ada. Tetapi pada momen ini pemuda di Sidoarjo mampu menunjukkan salah satu keahliannya dengan bermain musik.

“Tidak cukup hanya menjadi orang pintar tidak cukup hanya punya titel tapi yang terpenting adalah orang yang harus praktek dan punya keahlian. Serta 100% orang yang ahli itu pasti orang yang mempunyai pengalaman dalam keahliannya dengan praktek,” ujarnya.

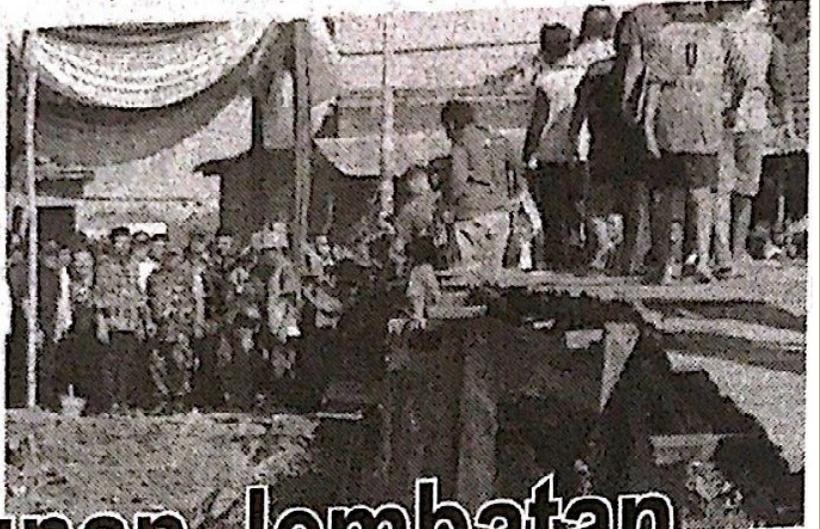
Ketua PW IPNU Provinsi Jawa Timur, M. Fakhrol Irfansyah juga berharap bagi IPNU dan IPPNU yang baru dilantik. Bahwa IPNU dan IPPNU Kabupaten Sidoarjo banyak pola-pola adaptasi yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat dengan kunci yang cuma satu. Bagaimana teman-teman anak-anak muda ini banyak berpendidikan yang jelas tapi tidak punya skill. ● dar



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PERTAMA - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan jembatan Shiratal Mustaqim yang dikerjakan PT Mulyo Joyo Makmur dengan nilai Rp 1,4 miliar di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jumat (23/06/2023).



Pembangunan Jembatan Shiratal Mustaqim, Klurak - Balongdowo Mulai Dikerjakan

Sidoarjo, Memo X

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan jembatan Shiratal Mustaqim yang dikerjakan PT Mulyo Joyo Makmur dengan nilai pekerjaan Rp 1,4 miliar. Jembatan ini menghubungkan Desa Klurak dan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Pembangunan jembatan ini untuk meningkatkan perekonomian warga di kedua desa itu.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan pembangunan infrastruktur jembatan yang memadai ini untuk meningkatkan konektivitas dan memajukan ekonomi lokal kedua desa. Baginya, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat salah satunya dengan pembangunan jembatan itu.

"Pembangunan jembatan ini akan memberi manfaat signifikan bagi warga Desa Klurak dan Desa Balongdowo. Selain meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, jembatan ini juga membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kami berkomitmen terus meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo demi kemakmuran masyarakat," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini di sela peletakan batu pertama Pembangunan Jembatan Desa Klurak, Jumat (23/06/2023).

Selain itu, Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo ini menjelaskan jembatan ini memiliki panjang 24,6 meter dan lebar 2,5 meter yang melintasi sungai yang memisahkan kedua di wilayah itu. Pembangunan jembatan ini diharapkan akan membuka akses yang lebih baik bagi warga desa dan daerah sekitarnya. "Terutama menuju ke pusat-pusat perdagangan, pendidikan serta fasilitas kesehatan," tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono menegaskan anggaran untuk pengerjaan jembatan yang di targetkan selesai hingga akhir Desember 2023 atau selama 180 hari kerja ini sebesar Rp 1,4 miliar. (par/wan)

Proyek Betonisasi Dimulai

Gus Muhdlor Pastikan Jalan Tarik - Mliriprowo Bakal Ditutup Total

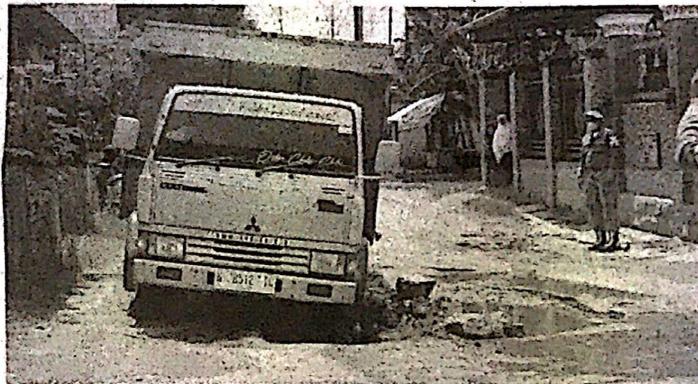
Sidoarjo, Memo X

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo segera mulai pengerjaan betonisasi JL Raya Desa Tarik sampai Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo mulai Senin (26/06/2023) hari ini. Saat pembangunan proyek betonisasi jalan itu bakal ditutup total.

Pembangunan jalan beton ini melintasi empat desa di Kecamatan Tarik. Yakni Desa Tarik, Singogalih, Kedungbocok dan Desa Mliriprowo. Panjangnya mencapai 5,7 kilometer dengan lebar 5 meter. Selama pengerjaan jalan akan ditutup total bagi kendaraan roda empat atau lebih.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali meminta masyarakat empat desa itu tidak kaget. Apalagi, Jumat (23/06/2023) malam, Pemkab Sidoarjo mensosialisasikan pembangunan infrastruktur pembangunan jalan beton itu. Ratusan warga di empat desa itu diundang mengikuti sosialisasi di Balai Desa Singogalih.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali hadir memberitahukan jika proyek betonisasi JL Raya Desa Tarik sampai Desa Mliriprowo dikerjakan Senin besok.



SOSIALISASI - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mensosialisasikan rencana pembangunan jalan beton di Balai Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jumat (23/06/2023) malam.

Dirinya berharap warga dapat memahami dampak proyek itu. Aktivitas warga akan sedikit terhambat. Mungkin debu juga sedikit mengganggu. Namun semua itu demi keberuntungan orang banyak.

"Mohon dukungannya proyek betonisasi jalan Tarik sampai Mliriprowo yang dikerjakan Senin besok. Tanpa dukungan penjenengan semua, proyek ini tidak akan berjalan lancar," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada Memo X, Jumat (23/06/2023) malam.

Selain itu, Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo

bersabar.

"Masyarakat harus mendukung agar proyek tersebut selesai tepat waktu. Membangun Sidoarjo tanpa ada dukungan masyarakat akan percuma dan tanpa partisipasi masyarakat hasilnya juga percuma," tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Sementara Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Eko Dwi Saptono menegaskan kendaraan roda empat dipastikan tidak dapat lewat saat pengerjaan proyek betonisasi berlangsung. Namun motor warga masih diperbolehkan. Alasannya, masih ada jalan 1 meter di sisi kanan kiri jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua. Nantinya, juga terdapat pengerjaan saluran air dimasing-masing sisi jalan itu. (par/war)

Turunkan AKI, AKB dan Stunting di Sidoarjo Perkuat Skrining Ibu Hamil, Siapkan Layanan ANC dan Libatkan Remaja

Sidoarjo, Memo X

Upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta stunting dilakukan dari hulu. Skrining terhadap ibu-ibu hamil terus dilakukan Pemkab Sidoarjo.

Upaya ini untuk menentukan bayi yang dikandung terdapat kelainan tertentu atau tidak. Selain itu, pelayanan ANC (Antenatal Care) atau perawatan ibu dan janin selama masa kehamilan juga selalu dilaksanakan. Pelayanan itu melibatkan ibu-ibu kader PKK Desa. Di setiap Posyandu desa dan sejumlah pelayanan diberikan. Ditambah pelayanan pemeriksaan stunting terhadap balita. Semua dilakukan kader kesehatan dibantu kader PKK Desa.

Jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting bagi tenaga kesehatan dievaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo di

ruang Rapat Koperasi Delta Makmur Sidoarjo, Jumat (23/06/2023). Seluruh Ketua TP PKK Kecamatan dan kader kesehatan hadir di acara itu. Evaluasi ini untuk menentukan keberhasilan percepatan penurunan stunting di Sidoarjo telah dilaksanakan.

Rapat ini dibuka langsung Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor. Acara juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, Dr Feny Apridawati.

Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan peran kader PKK penting dalam percepatan penurunan AKI, AKB dan stunting. Mereka langsung bersentuhan dengan sasaran program itu. Bahkan, mereka mengetahui langsung keadaan ibu hamil maupun balita yang ada di lingkungannya.

"Kader PKK dapat memberi-

kan edukasi kepada ibu hamil soal pentingnya pemeriksaan kehamilan dengan datang ke Posyandu. Lakukan pendekatan kepada ibu hamil atau orang tua yang memiliki anak yang mengalami masalah gizi. Ajak ke Posyandu, beritahu cek kesehatan di Posyandu tidak bayar dan akan mendapatkan vitamin serta diberi penjelasan," ujar Istri Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Ning Sasha ini.

Selain itu, Ning Sasha menjelaskan peran kader PKK ini akan sangat membantu percepatan penurunan AKI, AKB dan stunting. Cita-cita itu akan terwujud dari ibu hamil yang sehat dengan rutin memeriksakan kehamilan serta anak yang sehat dengan kepedulian orang tua. Terutama dengan memberi imunisasi kepada buah hati.

"Kader PKK dapat menyampa-



TURUNKAN - Istri Bupati Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor membuka acara jejaring skrining layak ibu hamil, ANC dan stunting bagi tenaga kesehatan bersama Dinkes Pemkab Sidoarjo di ruang Rapat Koperasi Delta Makmur Sidoarjo, Jumat (23/06/2023).

kan edukasi kepada ibu hamil soal pentingnya pemeriksaan kehamilan dengan datang ke Posyandu. Lakukan pendekatan kepada ibu hamil atau orang tua yang memiliki anak yang mengalami masalah gizi. Ajak ke Posyandu, beritahu cek kesehatan di Posyandu tidak bayar dan akan mendapatkan vitamin serta diberi penjelasan," ujar Istri Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Ning Sasha ini.

kan edukasi kepada ibu hamil soal pentingnya pemeriksaan kehamilan dengan datang ke Posyandu. Lakukan pendekatan kepada ibu hamil atau orang tua yang memiliki anak yang mengalami masalah gizi. Ajak ke Posyandu, beritahu cek kesehatan di Posyandu tidak bayar dan akan mendapatkan vitamin serta diberi penjelasan," ujar Istri Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Ning Sasha ini.

kan edukasi kepada ibu hamil soal pentingnya pemeriksaan kehamilan dengan datang ke Posyandu. Lakukan pendekatan kepada ibu hamil atau orang tua yang memiliki anak yang mengalami masalah gizi. Ajak ke Posyandu, beritahu cek kesehatan di Posyandu tidak bayar dan akan mendapatkan vitamin serta diberi penjelasan," ujar Istri Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Ning Sasha ini.

kan edukasi kepada ibu hamil soal pentingnya pemeriksaan kehamilan dengan datang ke Posyandu. Lakukan pendekatan kepada ibu hamil atau orang tua yang memiliki anak yang mengalami masalah gizi. Ajak ke Posyandu, beritahu cek kesehatan di Posyandu tidak bayar dan akan mendapatkan vitamin serta diberi penjelasan," ujar Istri Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Ning Sasha ini.

MEMO X

Bangun Jembatan Antardesa, Tingkatkan Perekonomian Warga

KOTA-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan jembatan Shiratal Mustaqim di Kecamatan Candi, Jumat (23/6). Jembatan tersebut menghubungkan Desa Klurak dengan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengatakan, pembangunan infrastruktur yang memadai perlu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan memajukan ekonomi lokal.

Doa menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat salah satunya dengan pembangunan jembatan tersebut.

Menurut dia, pembangunan jembatan itu akan memberikan manfaat signifikan bagi warga Desa Klurak dan Desa Balongdowo. Selain meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, juga bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur di

Kabupaten Sidoarjo demi kemakmuran masyarakat," ujarnya.

Gus Muhdlor menyebutkan, jembatan itu memiliki panjang 24 meter dan lebar 2,5 meter. Pembangunannya diharapkan akan membuka akses yang lebih baik bagi warga desa dan daerah sekitarnya ke pusat-pusat perdagangan, pendidikan, serta fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, anggaran untuk pengerjaan jembatan disiapkan sebesar Rp 1,4 miliar. Pengerjaannya ditargetkan selesai akhir Desember mendatang. "Jembatannya mampu menampung beban seberat 20 ton," imbuhnya.

Dia mengatakan, pembangunan jembatan merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan jembatan ini diharapkan selesai



DIMULAI: Peletakan batu pertama pembangunan jembatan Shiratal Mustaqim di Klurak, Candi yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan pengawasan ketat dari pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanannya.

"Diharapkan pembangunan jembatan di Desa Klurak ini dapat

menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan mendorong perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. (nis/vga)

KPU Tetapkan 1,4 Juta Orang Masuk DPT Pemilu 2024

KOTA-Komis Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum tahun 2024 sebanyak 1.461.642 pemilih. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua KPUD Sidoarjo M Iskak, Rabu (21/6).



Ketua KPU Sidoarjo M Iskak

ngutan Suara (TPS) untuk pemilu serentak tahun 2024. "Yakni sebanyak 5.566 titik," ujar Iskak.

Dari jumlah TPS tersebut, terdapat 15 TPS yang merupakan Lokasi Khusus (Loksus). Sedangkan jumlah TPS reguler berjumlah 5.551.

Iskak menyebutkan, jumlah pemilih yang ada di TPS Loksus mencapai 3.860 orang. Tersebar di dua Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan dua Rumah Tahanan (Rutan) yang terletak di Kecamatan Waru, Sidoarjo, dan Kecamatan Porong. Para pemilih ini akan mencoblos di keempat lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan tersebut.

Dia sangat mengapresiasi kerja-kerja jajaran badan Ad-Hoc di Kabupaten Sidoarjo,



SAH: Rapat pleno penetapan DPT Pemilu 2024 yang digelar oleh KPU Sidoarjo, Rabu (21/6).

yang tanpa lelah melakukan pemetaan dan perbaikan sejak awal turunya Daftar Pemilih Potensial (DP4) hingga proses penetapan DPT ini.

Tak lupa dia juga mengucapkan terimakasih kepada Jajaran Bawaslu yang telah mengawal dan mengawasi kerja-kerja KPU Kabupaten Sidoarjo

sehingga daftar pemilih yang ditetapkan memenuhi indikator Akurasi, dan Mutakhir.

Sementara itu, Divisi SDM Parmas KPU Sidoarjo Fauzan Adim merinci, di Rutan Kelas 1 A Surabaya di Desa Medaeng, Kecamatan Waru ada 1.346 pemilih yang terbagi dalam 5 TPS. Selain itu,

terdapat Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong dengan jumlah pemilih sebanyak 194 orang dengan jumlah TPS satu titik.

Ada pula Lapas Kelas I A Surabaya di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong dengan jumlah pemilih sebanyak 1.518 orang yang

tersebar di 6 TPS. Terakhir, terdapat Lapas Kelas II A Sidoarjo yang berlokasi di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo dengan jumlah pemilih sebanyak 802 orang yang tersebar di 3 TPS.

Fauzan menekankan bahwa seluruh saran dan perbaikan DPT telah ditindaklanjuti sebelum ditetapkan.

kan. Caranya dengan melakukan konfirmasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hasilnya, tidak ada catatan dari Bawaslu dan Partai Politik terhadap Berita Acara Pleno Rekapitulasi, sehingga penetapan DPT dapat dilakukan pada 21 Juni," katanya.

• Ke Halaman 10



KPU Tetapkan 1,4 Juta...

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sidoarjo Musonif Afandi juga menyampaikan apresiasi terhadap bantuan dan kerjasama dari

berbagai pihak di luar penyelenggara pemilu.

"Secara berkala memberikan informasi dan masukan demi tercapainya data pemilih yang komprehensif," ucapnya. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Capaian Pajak Reklame Sudah Lebih dari 50 Persen

KOTA-Pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dari sektor pajak reklame mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam kurun waktu lima bulan, yakni mulai dari Januari hingga Mei tahun ini, pendapatan dari pajak reklame yang tercatat di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) mencapai angka Rp 8,29 miliar.

Realisasi pendapatan tersebut mencapai lebih dari 50 persen dari target yang ditetapkan. Yakni sebesar Rp 16 miliar.

Kepala BPPD Sidoarjo Sri Suryono mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya realisasi pendapatan dari pajak reklame. "Kami melakukan pengawasan intensif sepanjang tahun ini dan juga sering melaksanakan operasi gabungan," ujarnya.

PADAT. Deretan reklame tertib pajak yang dipasang di bundaran Aloha.

● Ke Halaman 10



Capaian Pajak...

Dari total pendapatan tersebut, sebagian besar berasal dari iklan perusahaan. Posisi kedua tertinggi ditempati oleh iklan bisnis properti, seperti hotel, restoran, dan ruko.

Menurut Ari, jika tren peningkatan pendapatan pajak reklame terus berlanjut, kemungkinan akan ada perubahan target pada akhir tahun atau pada triwulan keempat nanti.

Dia berharap target pendapatan dari pajak reklame pada tahun ini dapat

tercapai. Pihaknya terus memantau dan melakukan pemetaan lokasi baru untuk objek pajak reklame guna mengoptimalkan pendapatan. Upaya serupa juga dilakukan pada objek pajak lainnya.

Selain pajak reklame, Ari juga

melaporkan peningkatan pendapatan dari beberapa objek pajak lainnya. Misalnya, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang telah terealisasi sebesar Rp 165 miliar dari target sebesar Rp 350 miliar. Selain itu, pajak parkir juga sudah terealisasi Rp 11 miliar dari

target Rp 18 miliar.

Dengan adanya peningkatan pendapatan dari sektor pajak, maka akan dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

804 Bacaleg Perbaiki Syarat Administrasi

KOTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo telah menggelar acara penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu 2024, Sabtu (24/6). Dari total 817 bakal calon legislatif (bacaleg), tercatat bahwa hanya 13 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sementara sisanya sebanyak 804 belum memenuhi syarat (BMS).

Ketua KPU Sidoarjo Mu-

khamad Iskak menjelaskan, ada kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang kurang. Yakni mulai hari ini hingga 9 Juli mendatang. Untuk itu, dia meminta LO partai politik dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU melalui Helpdesk SILON.

Terutama terkait hal-hal yang belum dipahami mengenai persyaratan dokumen bakal calon. "Perlu dilakukan agar semua bakal calon dapat memenuhi persyaratan yang

ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Sidoarjo Ana Aziza menjelaskan bahwa selama periode verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon oleh operator SILON, terdapat beberapa kesalahan teknis yang menyebabkan status bakal calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain

● Ke Halaman 10



PENGUMUMAN: KPU Sidoarjo menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD, Sabtu (24/6).



804 Bacaleg...

seperti kurangnya tanda centang, permasalahan substansi seperti kesalahan penulisan, fotokopi e-KTP yang tidak sesuai, atau dokumen lain

yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SILON.

Dia menyebutkan, LO partai politik dapat membaca secara langsung di SILON. Kemudian, dapat berkomunikasi dengan kami

melalui helpdesk.

"Untuk penggunaan formulir, harap menggunakan format yang telah diatur dalam SILON juga," imbuhnya.

Dengan adanya masa perbaikan dokumen bakal calon, diharapkan semua bakal calon legislatif dapat memenuhi syarat yang ditentukan

oleh KPU. Sehingga dapat melanjutkan proses selanjutnya dalam pemilihan umum yang akan berlangsung pada 2024 mendatang. (nis/vga)

PEMASANGAN IKLAN





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Perangkat Desa Tuntut Kenaikan Siltap, Kayan : Komandonya Ada Di Bupati Sidoarjo

by Radar Jatim — 23 Juni 2023 in Politik

0



H. Kayan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.



SIDOARJO (RadarJatim.id) Beberapa hari yang lalu, ribuan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo melakukan unjuk rasa untuk menagih janji Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali yang akan menaikkan penghasilan tetap (siltap) mereka secara berkala.

H. Kayan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatakan bahwa dirinya sangat memahami terkait tuntutan kenaikan siltap yang dilakukan oleh perangkat desa, Kamis (23/06/2023).

“Kami setuju-setuju saja, selama APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) kita mampu untuk itu,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo itu mengungkapkan bahwa siltap perangkat desa yang hanya Rp 2.190 ribu saat ini memang dirasa terlalu kecil ditengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Untuk itu, ia akan mendukung dan mengawal apabila anggaran untuk siltap perangkat desa itu dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 nanti. “Namun komandonya tetap di Bupati (Sidoarjo, red), kami akan menyetujui kalau anggaran untuk siltap itu dimasukkan dalam APBD 2024 nanti,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sidoarjo itu menyebutkan kalau konsep yang ditawarkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sidoarjo disetujui, maka anggaran siltap yang dikeluarkan oleh APBD 2024 sebesar Rp 55 milyar.

Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat didesanya masing-masing, jika tuntutan mereka dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

“Kami berharap ada peningkatan kinerja, kalau tuntutan mereka nanti jadi dikabulkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada aksi unjuk rasa di Pendopo Delta Wibawa (02/06/2023) lalu, para pengunjung rasa hanya ditemui oleh Pj Sekda, Andjar Sudjarwadi, Asisten I, Ainur Rahman, Kepala Dinas PMD, Mulyawan, Ketua Komisi A, Damroni Chudlori dan Wakil Ketua Komisi A, Haris. **(mams)**





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kurang Sosialisasi, Banyak Mahasiswa Tak Tersasar Program Beasiswa Pemkab Sidoarjo

by Radar Jatim — 23 Juni 2023 in Pendidikan

0



Suasana audiensi mahasiswa Umaha Sepanjang dengan Komisi D diwang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo.

71
VIEWS



SIDOARJO (RadarJatim.id) — Puluhan mahasiswa dari Universitas Maarif Hasyim Latif (Umaha) Sepanjang, Kecamatan Taman melakukan audiensi dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (22/06/2023).



Puluhan mahasiswa itu disambut langsung oleh Ketua Komisi D, Abdillah Nasikh, Sekretaris Komisi D, Bangun Winarso, anggota Komisi D, Aditya Nindyatman, Riza Ali Faizin dan Zahlul Yussar.

Dalam audiensi diruang paripurna DPRD Kabuapten Sidoarjo itu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa, salah satunya tentang sulitnya mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Lidya, salah satu mahasiswi mengatakan bahwa dirinya pernah mendaftar untuk mendapatkan beasiswa dari Pemkab Sidoarjo melalui jalur prestasi, namun tidak lolos.

"Saya pernah mendaftar. Nilai saya tinggi, tapi tidak lolos," katanya.

Selain itu, ia berharap agar syarat usia sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan beasiswa dari Pemkab Sidoarjo dapat dihapus, agar mereka yang benar-benar layak bisa mendapatkan beasiswa tersebut.

Abdillah Nasikh menjelaskan bahwa ada beberapa program beasiswa yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo, diantaranya beasiswa melalui jalur prestasi akademik, non akademik, keluarga tidak mampu dan jalur agama.

Jalur-jalur beasiswa itu pintu masuknya dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk jalur non akademik atau olahraga, Dinas Sosial (Dinsos) jalur keluarga tidak mampu dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk jalur agama.

"Mungkin kurangnya sosialisasi. Karena banyak mahasiswa yang tidak tahu, dipikir satu pintu. Sehingga yang seharusnya mahasiswa ini bisa masuk pintu (keluarga, red) tidak mampu, justru malah masuk pintu prestasi akademik. Akhirnya tertolak," jelasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Untuk itu, ia meminta kepada OPD-OPD terkait untuk gencar melakukan sosialisasi ke kampus-kampus di seluruh Kabupaten Sidoarjo agar para mahasiswa bisa memanfaatkan program beasiswa tersebut.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyarankan agar beasiswa dari Pemkab Sidoarjo sebaiknya lewat satu pintu atau satu OPD saja, sehingga mahasiswa yang akan memanfaatkan program beasiswa tersebut tidak merasa kebingungan.

“Bisa dipakai jalur satu pintu. Tinggal diklasifikasikan saja, sehingga tidak akan terjadi kebingungan dari para mahasiswa yang akan memanfaatkan program beasiswa ini,” terangnya.

Program beasiswa yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo mulai dari jenjang S-1, S-2 hingga S-3, baik kuliah di universitas dalam negeri maupun di luar negeri. **(mams)**

